

Judul : Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah: Perlu Adanya Reformasi Kelembagaan di DPR  
Tanggal : Selasa, 18 April 2017  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 14

## ADVERTORIAL

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah:

## Perlu Adanya Reformasi Kelembagaan di DPR

Dewasa ini kita dihadapkan pada situasi sosial dan politik yang cukup kompleks dan dinamis. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja wakil rakyat, lembaga perwakilan, baik DPR maupun DPRD, kita juga dihadapkan pada situasi di mana citra lembaga perwakilan tidak sepenuhnya dipandang baik oleh rakyat. Karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh meliputi aspek kedewanan dan kesekretariatan.



Jakarta 17 - 18 April 2017

Hal itu mengemuka pada seminar nasional bertajuk *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan* di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (17/4).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, diperlukan reformasi kelembagaan. Reformasi itu meliputi penataan aspek kedewanan dan kesekretariatan yang akan difokuskan pada pengembangan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan tata laksana, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana, kemandirian anggaran, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pembenahan birokrasi.

"Dalam melakukan reformasi, DPR sebagai lembaga perwakilan posisinya harus semakin otonom," tegas Fahri saat membuka seminar sekaligus menjadi salah satu *keynote speaker* dalam makalahnya yang berjudul "Kinerja Berbasis Etika".

Fahri menambahkan, DPR RI merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern di Indonesia. Karena itu, prinsip pemerintahan demokratis modern adalah lembaga-lembaga kekuasaan negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, dipilih melalui pemilihan yang bebas, serta menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR RI yang berperan sebagai penyeimbang lembaga eksekutif melalui mekanisme *check and balances*, pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembentukan undang-undang, representasi, dan diplomasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Adies Kadir mengatakan, persepsi publik yang negatif terhadap lembaga dewan merupakan bentuk kecintaan terhadap lembaga perwakilan. Kecintaan itu bisa disampaikan dalam bentuk apresiasi, pujian, juga kritik. Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan vitamin yang membuat semakin *aware* dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD RI, dan DPRD

sebagaimana diubah dengan UU no 42 tahun 2014.

"Secara khusus, kita patut berbangga atas kinerja DPR RI tahun 2014-2019 saat ini. Dengan dinamika politik yang begitu kompleks, kita mampu menjalankan tugas dengan baik," ujar Adies. DPR RI mampu mengimplementasikan tema besar DPR RI periode saat ini yakni membangun demokrasi yang efektif melalui kerja nyata parlemen.

Menurutnya, tema kali ini telah teraktualisasi dalam tugas-tugas DPR RI hingga saat ini. Meski diakui bahwa dinamika sosial politik hukum dan ekonomi juga semakin berkembang dan menuntut keselarasan dengan kinerja lembaga perwakilan. Oleh karena itu, seminar nasional yang diadakan oleh MKD ini adalah upaya dan ikhtiar MKD dalam merespons dan mengakomodasi persepsi publik dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga perwakilan.

"Dengan kata lain, kami ingin masyarakat melihat bahwa DPR RI atau legislatif betul-betul telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang ada. Terkait dengan adanya lembaga survei yang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup, itu harus dihilangkan. Namun, kami menyadari sepenuhnya, upaya tersebut tidaklah mudah. Meski mekanisme dan prosedur dijalankan dengan baik, dinamika sosial, politik dan ekonomi senantiasa memberi warna tersendiri tentang perjalanan tugas dan fungsi lembaga perwakilan secara umum," ujar Adies.

Pasalnya, lanjut Adies, dari jumlah keseluruhan anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang, hanya sebagian kecil yang tersangkut kasus korupsi. Namun, itu sudah menjadi berita besar atau menghebohkan. Sementara di eksekutif, berapa banyak gubernur, bupati, atau wali kota di seluruh Indonesia yang tersangkut korupsi, nyaris tidak terdengar suaranya.

Oleh karena itu, sebagai lembaga etik sesuai dengan amanat pasal 119 UU no 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana diubah dengan UU no 42 tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa, serta keluhuran martabat DPR RI baik secara kelembagaan maupun personal. Tugas itulah yang membuat MKD berdiri di garis terdepan, tidak hanya dalam rangka mengawasi kinerja lembaga perwakilan, tetapi juga memproteksi berbagai persepsi dan citra tentang lembaga perwakilan.

Pada kesempatan itu juga hadir Wakil Ketua MKD DPR RI Syarifudin Sudding dan anggota MKD lainnya, seperti Maman Imanul Haq, Guntur Sasono, serta beberapa pembicara yang merupakan pakar di bidangnya seperti Linca Marzuki, Siti Zuhro, dan lain-lain. [\*\*]